

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Selain itu anggaran juga merupakan alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemberlakuan UU No. 22/1999 dan UU No 25/1999 tentang Pemerintahan dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah memberikan kebebasan bagi daerah dalam mengalokasikan sumber pendanaan yang dimiliki sesuai dengan prioritas .

Sumber Penerimaan dan pendapatan daerah dinyatakan dalam pasal 79 UU Nomor 22 /1999 dan pasal 4 UU 25/1999 bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Kajian terhadap potensi penerimaan PAD memegang peranan penting ,khususnya dalam merencanakan dan menghitung pendapatan daerah secara tepat. Hal demikian dapat dijadikan acuan untuk mengetahui

kemampuan pembiayaan yang diharapkan dapat dipenuhi dari potensi pendapatan daerah setempat. Senjangan anggaran biasanya ditentukan karena perbedaan antara anggaran yang dibuat dengan prediksi anggaran sesungguhnya

Berhubungan dengan perkiraan Pendapatan Asli Daerah yang akan diterima, penentuan target pendapatan masih ada kecenderungan didasarkan atas incremental sekian persen dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga terjadi suatu senjangan antara potensi dan realisasi.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadi senjangan anggaran, antara lain :

1. **Pengaruh asimetri informasi** dalam penyusunan anggaran yang semakin tinggi akan menciptakan slack karena ada kecenderungan bahwa manajer bawah mempunyai informasi yang lebih baik mengenai aktivitas dalam bidang yang menjadi tanggungjawabnya karena secara teknis lebih mengenal bidang pekerjaannya sehingga dapat menilai pengaruh potensi factor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi rencana target pendapatan.

Asimetri informasi juga sering terjadi antara Eksekutif dengan legislatif target pendapatan asli daerah. Eksekutif merupakan lembaga yang lebih mapan dibandingkan dengan legislatif dalam upaya melaksanakan perencanaan pendapatan asli daerah. Dengan tingginya informasi yang dikuasai oleh eksekutif, legislatif memiliki kelemahan yang signifikan dalam melakukan fungsi pengujian, menyeimbangkan

terhadap rencana pendapatan asli daerah yang diusulkan oleh pemerintah daerah.

Perbedaan pengalaman dan pengetahuan antar personal dalam perencanaan anggaran menimbulkan perasaan emosi yang cenderung munculnya rasa egois masing-masing personal pada saat penentuan target anggaran. Disatu sisi ingin merasa aman dalam menentukan target agar dapat dicapai, sisi yang lain menentukan target sesuai potensi yang ada.

Senjangan anggaran terjadi karena adanya informasi yang bias dari bawahan kepada manajer dengan cara menginformasikan target pendapatan yang lebih rendah dengan maksud apabila terjadi kelebihan target maka kinerja bawahan menjadi baik.

Menurut Hansen dan Mowen (1997), *Subordinate* (bawahan) termotivasi oleh insentif apabila pengukuran kinerja berdasarkan pencapaian target anggaran .

Adanya partisipasi dari bawahan dalam menyusun anggaran pendapatan , dapat memberikan kesempatan untuk memasukan informasi lokal. Dengan cara ini bawahan dapat mengkomunikasikan atau mengungkapkan beberapa informasi yang mungkin dapat dimasukan dalam standar yang dipakai dalam dasar pengukuran kinerja, namun bawahan dapat juga tidak mengungkapkan atau menyembunyikan beberapa informasi pribadi sehingga dapat mempengaruhi adanya slack. Dengan kata lain informasi lokal yang dimiliki bawahan (informasi

asimetris) dapat mempunyai pengaruh positif ataupun negatif terhadap slack.

2. **Tekanan sosial** akibat Otorisasi oleh legislatif terhadap rencana anggaran pendapatan menjadi salah satu sebab adanya tekanan sosial yang akan mempertinggi terjadinya *slack*.

Regulasi Pemerintah Pusat tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang antara lain menyebutkan bahwa plafond anggaran pendapatan adalah minimal dan plafond belanja adalah maksimal informasi yang akan mengakibatkan terjadinya senjangan anggaran pendapatan.

## **2. Batasan Masalah**

Dari uraian tersebut diatas maka penulis dalam melakukan kajian membatasi masalah pada pengaruh variabel asimetri informasi dan tekanan sosial terhadap terjadinya senjangan anggaran Pendapatan Asli Daerah pada APBD Propinsi DIY.

## **3. Perumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka permasalahan yang timbul adalah , bagaimana pengaruh interaksi informasi asimetris dan tekanan sosial terhadap senjangan anggaran Pendapatan Asli Daerah ?

## **4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **4.1. Tujuan penelitian.**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis bagaimana pengaruh Asimetri informasi terhadap senjangan anggaran
2. Menganalisis bagaimana pengaruh Tekanan Sosial terhadap senjangan anggaran.
3. Menganalisis asimetri informasi dan tekanan sosial secara bersama-sama berpengaruh terhadap terjadinya senjangan anggaran

#### **4.2. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai sumbang saran atau pemikiran bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Propinsi DIY bahwa dalam mengambil keputusan penyusunan target anggaran pendapatan asli daerah harus mendasarkan potensi yang ada .
2. Memberikan tambahan ilmu mengenai pengaruh variable-variabel dalam perencanaan target anggaran pendapatan, terutama pengaruh variable-variabel yang dapat mempengaruhi terjadinya senjangan anggaran pendapatan asli daerah
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya khususnya